

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunannya agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan (Enda, 2005).

Kemiskinan menurut Levitan (1980) adalah kurangnya barang dan pelayanan seseorang untuk mencapai standar hidup yang layak. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. kemiskinan merupakan masalah global.

Secara umum kemiskinan adalah keadaan dimana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas, berada pada suatu peluang/kesempatan berusaha, Pendidikan, fasilitas hidup dan lainnya. Contoh kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi keluarga yang minim
2. Tinggal dirumah tidak layak huni
3. Masih hidup bergantung pada keluarga sekitar atau mengemis

Kemiskinan bisa dibagi menjadi empat jenis, yakni:

1. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Contohnya seseorang bekerja di bidang desain, namun orang tersebut ternyata tidak punya cukup keahlian di bidang desain.

2. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Contohnya seseorang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) tinggal dan menetap di Jakarta. Orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pendapatannya tidak mencukupi.

3. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi karena struktur sosialnya. Contohnya adalah para petani yang tidak memiliki tanah pribadi atau petani dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat. Kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

Contohnya: suku Badui yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan jaman. Selain itu, masyarakat urban juga banyak yang mengalami kemiskinan kultural karena terbiasa bermalas-malasan selama hidupnya.

Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagai sebuah persoalan kehidupan manusia, maka kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawaban kepada persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini. Ada kemiskinan dapat di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal antara lain : keadaan individu yang bersangkutan, keluarga, atau komunitas masyarakat di pandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan, adapun penyebab dari faktor eksternal yakni: kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Dalam pembukaan UUD 1945 tertuang amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbagai aspek yang melatarbelakangi adanya penanggulangan kemiskinan antara lain, aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial, politik, hukum dan ekonomi. Kebijakan pemerintah saat ini banyak diarahkan

pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki tahun 2021.

Dalam situasi wabah pandemi virus Corona, atau Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin bertambah banyak. Dalam beberapa bulan belakangan ini ekonomi seolah lumpuh, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Salah satunya adalah dengan menerapkan apa yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB meliputi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan roda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020). Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepatnya pada

bulan April 2020 dari mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia. pelaksanaan program ini di dasarkan oleh Permendes, Peraturan Mentri Keuangan, Serta Permenagri terbaru.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin berbentuk uang tunai sesuai dengan kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang diberikan secara langsung. (BLT) salah satu Program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), mulai terlaksana melalui Intruksi Presiden Nomor Tahun 2005, tentang “Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin “dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan bantuan langsung untuk rumah tangga sasaran“. Tujuan yang harus diharapkan melalui kebijakan program ini adalah untuk dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global. Sebagai suatu program dan kebijakan nasional kriteria penerima BLT yakni:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang berdomisili di desa bersangkutan, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi covid 19.

3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat, ini berarti calon penerima program keluarga harapan (PKH), kartu sembako.
4. Bukan salah satu dari perangkat desa.
5. Perangkat desa yang mendata penerimaan bantuan langsung tunai dapat memastikan keluarga miskin lansia, duda dan janda harus terdata sebagai penerima bantuan.

Adanya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) masyarakat desa Sanleo merasa bersyukur akan adanya program ini, akan tetapi pemanfaatan program ini belum tepat sasaran karena sebagian masyarakat Desa Sanleo yang salahgunakan bantuan ini, bukannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melainkan digunakan untuk berjudi dan membeli minuman keras, dikarenakan pemerintah desa, di desa sanleo kurang mensosialisasikan mengenai bantuan pemerintah ini terkait ketika masyarakat menerima bantuan langsung uang tunai tersebut, pendamping desa tidak bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dari uang yang telah diterima oleh masyarakat tersebut sehingga bisa saja bantuan tersebut di salahgunakan oleh masyarakat penerima bantuan dari pemerintah ini, dalam artian tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya, tetapi dipergunakan untuk hal-hal lain, seperti membeli rokok, membeli minuman keras atau bahkan untuk berjudi.

Bantuan langsung tunai (BLT) mendidik orang menjadi malas, selalu jadi bangsa peminta minta, (BLT) juga di anggap merusak aspek moral dan

sosial masyarakat miskin, karena (BLT) kemandirian masyarakat menurun, Mereka cenderung bergantung pada dana dan malas bekerja, kepercayaan juga makin turun karena saling curiga di antara mereka yang mendapat dan yang tidak mendapat. Bantuan langsung tunai (BLT) tidak mendewasakan masyarakat di didik untuk menerima jatah, di didik untuk menjadi bangsa peminta, (BLT) itu ibarat rakyat diberi ikan, jadi tinggal di makan saja, sehingga masyarakat tidak terlatih mencari ikan. Program bantuan langsung tunai hanya sebatas memeberikan dana yang bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat di desa pada masa pandemi tetap stabil.

Desa Sanleo adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka yang turut menyalurkan (BLT) Dana Desa tahun 2021 dengan jumlah penerima sebanyak 174 KK dengan anggran sebesar Rp. 626.400.000 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Setiap masyarakat penerima tersebut di berikan Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan di terima setiap Triwulan sebesar Rp. 900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah). Proses pendataan dan penetapan calon penerima program bantuan langsung tunai dana desa di desa Sanleo di lakukan dengan melakukan musyawarah desa (Musdes), hasil musyawarah sebagai penerima manfaat program bantuan langsung tunai yang mana penentuannya didasarkan kriteria penerima program bantuan langsung tunai, dan juga metode dan mekanisme penyaluran program bantuan langsung tunai ini menggunakan metode langsung yang artinya langsung di berikan kepada masyarakat

penerima sesuai dengan aturan dan hasil keputusan bersama sementara itu, untuk mekanisme penyalurannya yaitu masyarakat mendatangi balai desa dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dengan memperhatikan protokol kesehatan, mengisi daftar hadir, setelah nama penerima di panggil oleh pihak panitia masyarakat dapat langsung menerima uangnya lalu dokumentasi.

Diharapkan dengan adanya program pemberian bantuan secara langsung tunai tersebut, perekonomian masyarakat di desa bisa kembali bergerak dan daya beli masyarakat kembali pulih. Masyarakat di harapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya dengan cara menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok keluarga khususnya sembako. Jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut justru disalah gunakan oleh masyarakat penerima bantuan. Seperti misalnya dipergunakan untuk berjudi, membeli minuman keras, membeli rokok, serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pemberi bantuan. kebijakan (BLT) ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang miskin.

Dengan (BLT) kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM dan juga dampak dari covid 19 akan sedikit ditutupi dengan adanya dana "cuma-Cuma" yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi di satu sisi yang lain kebijakan (BLT) Ini memiliki dampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat riskan



menciptakan karakter-moral masyarakat yang selalu dimanja dan menjadi bangsa peminta minta, (BLT) juga di anggap merusak aspek moral dan sosial masyarakat miskin, karena (BLT) kemandirian masyarakat menurun, mereka cenderung bergantung pada dana dan malas bekerja, kepercayaan juga makin turun karena saling curiga di antara mereka yang mendapat dan yang tidak mendapat. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Masyarakat di Desa Sanleo semakin malas untuk bekerja Mereka hanya bergantung pada bantuan tersebut, tujuan pemerintah mungkin baik dan sangat positif yaitu membantu meringankan beban masyarakat, namun bantuan langsung tunai (BLT) adalah kebijakan instan yang bersifat sementara dan tidak mendidik masyarakat menjadi kreatif dan rajin.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya akan menimbulkan budaya ketergantungan dan sifat malas untuk bekerja, selain itu menimbulkan kecemburuan antar masyarakat. Bantuan ini hanya bersifat sesaat, apabila masyarakat malas untuk bekerja tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan semakin bertambah apalagi dengan pengangguran yang semakin banyak. Dengan permasalahan yang demikian, ada baiknya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skema bantuan langsung tunai (BLT), pendamping desa lokal seharusnya diperlukan sosialisasi komprehensif kepada masyarakat untuk menambah pemahaman mereka mengenai apa tujuan dari sosialisasi diadakan program ini, selain itu perlunya kontrol dari lembaga-lembaga yang menaungi program ini untuk meninjau kembali pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan persoalan yang dialami oleh masyarakat miskin mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sanleo dengan upaya-upaya yang ditekankan pada adanya perbaikan-perbaikan secara fundamental sehingga berdasarkan atas latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sanleo Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas masalah yang akan diteliti dalam rumusan masalah ini yaitu: Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sanleo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di desa Sanleo?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik manfaat secara akademik maupun praktis.

### **1.4.1 Akademik**

1. Sebagai pelengkap bahan studi Ilmu pemerintahan tentang gambaran langsung kebijakan publik dalam hal ini pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Sanleo.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berfokus pada kajian Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sanleo.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah ilmu pada jurusan ilmu pemerintahan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.
- 2) Bagi pemerintah, Sebagai masukan untuk merumuskan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.
- 3) Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.
- 4) Bagi Pemerintah Desa Sanleo  
Bagi pemerintah desa sanleo sebagai data memberikan bantuan berdasarkan pendapatan dari masyarakat Desa Sanleo.